

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KECURANGAN (*FRAUD*) PEGAWAI DINAS PROVINSI JAWA TENGAH

Isti Khomah

Mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dista Amalia Arifah, S.E., M.Si., Akt., CA

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

(istikhomah177@gmail.com)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah. Variabel inde penden pada penelitian ini adalah keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan asimetri informasi. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kecurangan (*fraud*).

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada dinas provinsi jawa tengah. Dari 105 kuesioner yang disebarkan kepada responden hanya 101 kuesioner yang dapat dianalisis untuk pengujian hipotesis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS 26.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah, sementara sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah, dan asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : *keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi, asimetri informasi, dan kecurangan.*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors that influence the occurrence of fraud Employees of the Central Java Province Office. The independent variables in this study are distributive justice, procedural justice, internal control systems, enforcement of regulations, organizational commitment, organizational culture, and information asymmetry. The dependent variable in this study is fraud.

Respondents in this study were civil servants working in the Central Java Provincial Office. Of the 105 questionnaires distributed to respondents only 101 questionnaires can be analyzed for hypothesis testing. The analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 26.

The results of this study prove that distributive justice, procedural justice, enforcement of regulations, and organizational culture do not affect the fraud of Central Java Provincial Employees, while the internal control system and organizational commitment positively affect the fraud of Central Java Provincial Employees, and information asymmetry has a negative effect on fraud of the Employees of the Central Java Provincial Office.

Keywords: distributive justice, procedural justice, internal control systems, enforcement of regulations, organizational commitment, organizational culture, information asymmetry, and fraud.

Pendahuluan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa angka penindakan korupsi pada semester I tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017. Pada semester I ini penegak hukum telah melakukan penindakan sebanyak 139 kasus dengan 351 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dimana pada tahun 2017 dengan semester yang sama penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum sebanyak 266 kasus dengan 587 orang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kerugian yang ditanggung oleh negara akibat kasus korupsi pada semester I tahun 2018

sejumlah Rp 1,09 triliun dan nilai suap sejumlah Rp 42,1 miliar. Berdasarkan pemilahan yang telah dilakukan oleh ICW modus yang dilakukan adalah penyalahgunaan korupsi, mark up, tindakan suap, pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang (Kompas, 2018).

Pada sektor publik laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat mengenai kinerja dari entitas publik sebagai wujud tanggung jawab yang dilakukan secara transparan kepada publik. Oleh karenanya laporan keuangan harus disusun oleh

pegawai yang kompeten di bidang akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi serta berperilaku jujur agar terhindar dari tindakan salah pencatatan atau kecurangan akuntansi. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan kewajibannya secara efektif dan efisien. *Fraud* dalam instansi pemerintah disebabkan karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, serta adanya tekanan yang tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018) menghasilkan bahwa pengendalian internal dan penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud*, sedangkan keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Pristiyantri (2012) menghasilkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sementara sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Sementara pada penelitian Najahningrum (2013) di Dinas Provinsi DIY menyatakan bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan, dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan di sektor pemerintahan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Didi dan Kusuma (2018). Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian di atas dengan dengan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) dengan menambahkan variabel independen yaitu asimetri informasi karena didalam pemerintahan saat penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah agen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi prinsipal demi untuk memperoleh kompensasi yang tinggi, mempertahankan jabatan, serta tujuan lainnya.

Obyek dari penelitian ini adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah. Alasan dilakukannya penelitian di Jawa Tengah karena Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat keempat provinsi paling banyak kepala daerahnya yang terjat

korupsi. Selain itu, belum adanya penelitian mengenai kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Dinas Provinsi Jawa Tengah sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan obyek yang berbeda. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*), maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah**”

Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada tahun 1976 Jensen dan Meckling memperkenalkan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan bermaksud untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal pendelegasian ini akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) hal ini dimulai dengan adanya ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi (*asymmetric information*) yang akan memunculkan konflik.

Wilopo (2006) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi karena apabila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda-beda maka agen (eksekutif) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (legislatif) atau sebaliknya. Kepentingan terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan yang merupakan ukuran kinerja agen (eksekutif) menyebabkan pengelolaan anggaran rawan terjadi kecurangan.

2. *Fraud Triangle Theory*

Dalam Tuanakotta (2014) *Fraud triangle theory* merupakan suatu model yang menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan individu melakukan suatu tindakan kecurangan.

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan suatu keinginan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tekanan ini mencakup semua hal baik gaya hidup, tuntutan ekonomi. Tindakan kecurangan yang dilakukan seperti mengubah nominal dalam laporan keuangan atau korupsi.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan merupakan situasi dimana munculnya suatu kesempatan bagi seorang pegawai yang memungkinkan dirinya melakukan suatu kecurangan.

Cressy (1953) dalam (Tuanakotta, 2014) mendefinisikan kesempatan atau *opportunity* sebagai suatu peluang guna melakukan *fraud* seperti yang difikirkan oleh pelaku kecurangan.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan suatu hal yang sulit diukur dalam *fraud triangle theory*. Rasionalisasi dilakukan oleh individu dengan berbagai alasan namun terdapat pembenaran didalamnya. Rasionalisasi menjadi bagian yang penting dalam terjadinya kecurangan dima individu mencari pembenaran atas perbuatan yang telah dilakukan. “Rasionalisasi adalah suatu karakter yang membenarkan tindakan manajemen atau pegawai melakukan hal yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka membenarkan kecurangan.”

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecurangan (*Fraud*).

Keadilan distributif berhubungan dengan kegiatan dalam distribusi barang yang akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan individu. Menurut Moorhead dan Griffin (2013) keadilan distributif adalah persepsi orang-orang terhadap keadilan mengenai bagaimana suatu penghargaan dan hasil yang bernilai lainnya didistribusikan dalam sebuah

organisasi. Jika seorang individu mempersesipkan dirinya bahwa tidak mendapat keadilan atas kompensasi atau gaji yang harus diterima maka hal ini akan memunculkan motivasi untuk berbuat kecurangan. Hal dapat terjadi karena adanya tekanan yang muncul dari dalam individu tersebut berhubungan dengan ketidakadilan yang mendorong untuk melakukan perbuatan kecurangan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) yang menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Sehingga jika kompensasi diberikan sesuai dengan kinerja dari pegawai maka akan dapat menekan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

H₁ : Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

2. Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kecurangan (*Fraud*).

Menurut Moorhead dan Griffin (2013) keadilan prosedural adalah persepsi individu mengenai keadilan untuk menentukan berbagai hasil. Apabila prosedur dijalankan dengan baik maka akan menciptakan suatu keadilan dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*). Ketika seseorang

mempersiapkan bahwa prosedur pemberian gaji atau kompensasi dilakukan secara tidak adil maka akan memunculkan tekanan dalam diri orang tersebut. Secara perasaan akan menimbulkan ketidakpuasan pegawai sehingga akan menyebabkan pegawai melakukan berbagai hal termasuk melakukan kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Najahningrum (2013), Adinda dan Ikhsan (2015) menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

H₂ : Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan (*Fraud*).

Sistem pengendalian internal menurut Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pasal 1 Ayat 1. Dalam PP SPIP pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Semakin baik sistem pengendalian internal dalam satu entitas maka akan dapat meminimalisir terjadinya *fraud*. Teori ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018), Wulandari dan Suryandari (2016), Faisal (2013), Pristiyanthi (2012), yang menghasilkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

H₃ : Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

4. Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecurangan (*Fraud*).

Penegakan peraturan adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dari sikap atau tindakan sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup (Soekanto, 2011). Bila penegakan peraturan dalam suatu organisasi atau instansi kurang efektif maka hal ini akan memberikan peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang. Namun kebanyakan individu tidak mematuhi peraturan walaupun mereka sadar akan adanya peraturan tersebut sehingga perlu adanya

kesadaran. Kesadaran individu akan muncul apabila penegakan peraturan berjalan dengan semestinya.

Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tegaknya penegakan peraturan dalam suatu instansi, maka akan semakin rendah pula kecurangan (*fraud*) terjadi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Didi dan Kusuma (2018) dan Najahningrum (2013) bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

H₄ : Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

5. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*).

Menurut Colquit et al (2009) komitmen organisasi adalah keputusan dari sebagian anggota untuk tetap menjadi anggota organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi maka telah memahami bahwa ketika bekerja tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kecurangan sering berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi maka akan menekan terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut. Teori ini sesuai dengan penelitian Najahningrum (2013), Faisal

(2013), Pristiyanti (2012), Adinda dan Ikhsan (2015) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

H₅ : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

6. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*).

Iklm budaya yang baik dalam suatu organisasi akan menciptakan perilaku yang baik pula pada setiap orang yang ada dalam lingkungan tersebut. Jika dalam suatu instansi tindakan kecurangan merupakan hal yang wajar terjadi maka akan merasionalisasi tindakan tersebut sebagai tindakan yang wajar atau biasa terjadi. Namun sebaliknya, jika dalam suatu instansi tertanam nilai-nilai bahwa kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan berbagai pihak maka pegawai tidak akan melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi persepsi pegawai terhadap budaya organisasi akan dapat menekan terjadinya *fraud*. Teori ini sesuai dengan hasil penelitian Pristiyanti (2012) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

H₆ : Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

H₇ : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*).

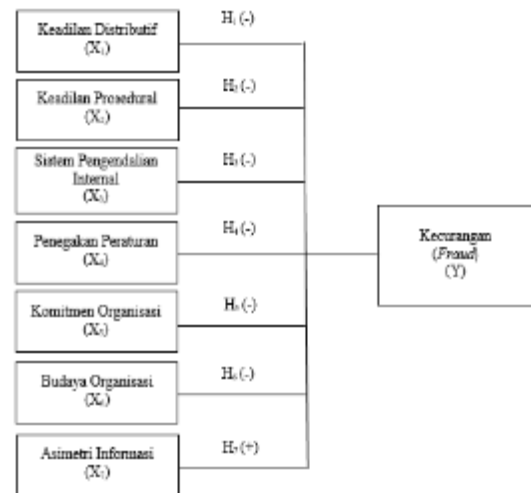
7. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*).

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana terjadinya ketidakselarasan informasi antara pihak *principal* dan *agent* (Wilopo, 2006). Dalam lingkup suatu entitas perusahaan yang menjadi pihak pengguna informasi merupakan masyarakat. Karena pihak Dinas Pemerintah merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat.

Pertanggungjawaban SKPD kepada masyarakat disajikan dalam bentuk laporan keuangan realisasi APBD. Jika masyarakat tidak mengetahui transaksi apa saja yang mempengaruhi laporan tersebut secara detail maka kemungkinan penyaji laporan akan melakukan tindakan manipulasi laporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suryandari (2016) dan Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laporan keuangan, terjadinya kecurangan akan semakin tinggi.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data primer.

Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Dinas Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 22 dinas.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada bagian subbag keuangan pada Dinas Provinsi Jawa Tengah.

Sumber dan Jenis Data

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian (Bungin, 2005). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan pengiriman kuesioner kepada para responden dalam hal ini para pegawai negeri sipil pada subbag keuangan yang berada di Dinas Provinsi Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode angket. Dalam penelitian ini menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah alternatif jawaban yang sudah disediakan dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah disediakan. Penelitian ini akan menggunakan skala Likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 = sangat tidak setuju
- 2 = tidak setuju
- 3 = netral
- 4 = setuju
- 5 = sangat setuju

Variabel dan Indikator

1. Kecurangan (*Fraud*)

Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang dikembangkan dari *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* dalam Najahningrum (2013) yang terdiri atas kecurangan pelaporan,

penyalahgunaan aset, dan korupsi. Setiap indikator diukur dengan 3 item pertanyaan.

2. Keadilan Distributif

Pengukuran variabel ini menggunakan 3 item pertanyaan yang dikembangkan dari (Pristiyanti, 2012) yang terdiri dari kompensasi usaha, kompensasi pekerja, dan kompensasi kinerja.

3. Keadilan Prosedural

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Colquitt yang terdiri dari 5 item pertanyaan yang terdiri atas kriteria, konsisten, tanpa kepentingan tertentu, akurat, dan sesuai etika dan dtandar moral dalam prosedur penggajian & kompensasi.

4. Sitem Pengendalian Internal

Instrument yang digunakan dalam menukur penelitian ini dikembangkan dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdiri dari 5 item pertanyaan diantaranya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan.

5. Penegakan Peraturan

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Faisal (2013) yaitu ketaatan terhadap hukum, proses penegakan hukum, peraturan

organisasi, disiplin kerja, dan tanggung jawab.

6. Komitmen Organisasi

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen dalam Pristiyantri (2012) yang terdiri atas 8 item yaitu bekerja melalui target, mengembangkan organisasi pada orang lain, menerima semua tugas, keasamaan nilai, bangga menjadi bagian dari organisasi, organisasi merupakan inspirasi, gembira memilih bekerja pada organisasi, dan peduli pada nasib organisasi.

7. Budaya Organisasi

Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Robins (2008) yang terdiri dari 5 item pertanyaan yaitu model peran yang *visible* komunikasi harapan etis, pelatihan etis, hukuman bagi tindakan etis, dan mekanisme perlindungan etika.

7. Asimetri Informasi

Instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi terdiri atas 6 item pertanyaan yang terdapat dalam Wilopo (2006) yaitu penyaji mempunyai informasi yang lebih banyak, lebih mengenal hubungan input output, lebih mengetahui yang dapat dicapai, lebih mengenal teknis pekerjaan, lebih mengetahui faktor eksternal, lebih mengetahui potensi kerja.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk menguji pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi dan asimetri informasi terhadap kecurangan (*fraud*). Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1KD + \beta_2KP + \beta_3SPI + \beta_4PP + \beta_5KO + \beta_6BO + \beta_7AI + e$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1 menyajikan hasil dari statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sehingga semakin kecil hasil standar deviasi maka akan semakin bagus karena semakin kecil hasil standar deviasi yang dihasilkan maka akan menunjukkan data-data yang dihasilkan berkumpul disekitar rata-rata hitungannya.

Masukkan Tabel 1 disini

Tabel 2 menyajikan hasil hasil pengujian validitas. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid, hal ini dapat dilihat pada nilai dari masing-masing item pertanyaan yang memiliki nilai total konstruk kurang dari 0,05.

Masukkan Tabel 2 disini

Tabel 3 menyajikan hasil dari uji reliabilitas. Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa bahwa indikator pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

Masukkan Tabel 3 disini

Tabel 4 menyajikan hasil dari uji normalitas. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogrov Smirnov* untuk persamaan regresi nilai signifikansi yang dihasilkan > 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Guna lebih memastikan bahwa data berdistribusi normal maka digunakan uji p-plot. Berdasarkan Gambar 2 memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Masukkan Tabel 4 dan Gambar 2 disini

Tabel 5 menyajikan hasil dari pengujian multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa *tolerance* masing-masing variabel bebas > 0,10 dan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas < 10 maka model persamaan regresi terbebas dari

masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Masukkan Tabel 5 disini

Tabel 6 menyajikan hasil dari pengujian heteroskedastisitas. Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Serta pada Gambar 3 menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

Masukkan Tabel 6 dan Gambar 3 disini

Tabel 7 menyajikan hasil dari regresi linier berganda. Nilai F pada tabel 7 sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ artinya variabel independen secara berpengaruh simultan / bersama samaterhadap varaibel indepdnen.

Masukkan Tabel 7 disini

Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian mendapatkan hasil bahwa keadilan distributif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecurangan

ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,878 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar $0,033$. Artinya keadilan distributif yang tinggi pada organisasi belum dapat menjamin dapat menekan kecurangan.

Hal ini terjadi karena terdapat kemungkinan bahwa penghargaan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan pada tempatnya bekerja selain itu juga kompleksnya pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai karena menangani seluruh dinas kota dan kabupaten yang cakupannya luas serta pertanggungjawaban langsung pada gubernur sehingga harus teliti sementara insentif yang diterima setara dengan orang yang bekerja di dinas kabupaten maupun kota.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018) serta Wulandari dan Suyandari (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan (*fraud*). namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda dan Ikhsan (2015) yang menyatakan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian mendapatkan hasil bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecurangan ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,246 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar $0,151$. Artinya keadilan prosedural yang tinggi pada organisasi tidak menjamin dapat menekan kecurangan.

Keadilan prosedural merupakan persepsi pegawai mengenai keadilan dalam penentuan prosedur pemberian kompensasi. Kompensasi yang diterima oleh pegawai negeri sipil telah sesuai dengan aturan pemerintah dimana pemberian kompensasi berdasarkan pada golongan dan lamanya bekerja.

Hal ini terjadi dikarenakan dalam pemberian remunerasi berdasarkan pada absensi yang dilakukan oleh pegawai yang memberikan nilai tambah pada hasil insentif selain itu juga dipengaruhi oleh loyalnya pegawai kepada pemimpin serta pemberian tugas yang dilakukan pejabat pada pegawai terselesaikan dengan baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018), Wulandari dan Suyandari (2016), dan Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa keadilan

prosedural tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian mendapatkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,010 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,464. Artinya sistem pengendalian yang tinggi pada organisasi meningkatkan kecurangan yang terjadi.

Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai maka dapat melakukan tindakan kecurangan tanpa memperhatikan prosedur yang ada dalam instansi. Meskipun sistem pengendalian internal sudah efektif diterapkan dalam instansi kecurangan masih dapat terjadi karena terdapat perilaku pegawai yang melenceng, adanya tuntutan, serta lingkungan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018), Faisal (2013), serta Adinda dan Ikhsan (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi terjadinya tindakan kecurangan.

Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian mendapatkan hasil bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,806 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar 0,464. Artinya tingginya penegakan peraturan belum tentu dapat menekan terjadinya kecurangan.

Hal ini dapat disebabkan karena dalam penegakan peraturan pejabat tebang pilih pada pegawai sehingga pegawai akan tetap dapat melakukan kecurangan. Dengan adanya pilih kasih dalam penegakan maka pegawai merasa tidak puas dan keadilan distributif serta keadilan prosedural merasa dicerai. Dengan pejabat lamban menangani masalah penegakan peraturan maka pegawai tidak khawatir dengan sanksi yang diberikan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018) yang menyatakan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suryandari (2016) serta Adinda dan Ikhsan (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penegakan peraturan dengan kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian mendapatkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,005 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,464. Artinya tingginya komitmen organisasi pada organisasi meningkatkan kecurangan yang terjadi.

Adanya kemungkinan bahwa pegawai berkomitmen hanya berdasar pada kepentingan dirinya sendiri (*self interest*) seperti pengakuan lebih atas pekerjaan yang dilakukan, ingin bergaya mewah oleh karena tindakan kecurangan tetap terjadi. Selain itu juga dikarenakan ketidakpuasan pegawai yang berhubungan dengan perkerjaannya sehingga sehingga saat pegawai tidak nyaman, ia akan memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018), Adinda dan Ikhsan (2015), Faisal (2013), serta Pristiyanti (2012).

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian mendapatkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecurangan ditunjukkan dengan nilai probabilitas

sebesar $0,709 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,65. Artinya semakin tinggi budaya organisasi belum tentu dapat menekan terjadinya kecurangan.

Hal ini memungkinkan terjadi karena tingkah laku pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan luar namun juga berasal dari individunya. Lingkungan luar dapat berasal dari perilaku dan pengaruh orang terdekat, pengalaman, moral dan agama, sementara lingkungan organisasi berasal dari meniru perilaku teman di organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018), Faisal (2012), dan Najahningrum (2013) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan.

Pengaruh Asimetri Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian mendapatkan hasil asimetri informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,007 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar -0,203. Artinya semakin

tinggi asimetri maka dapat menekan terjadinya kecurangan.

Hal ini mungkin terjadi karena adanya tindakan kolusi dalam pemerintahan agar kebijakan atau program kerja yang dibuat dapat dijalankan, sehingga ketidak seimbangan informasi dapat tertutupi dan kecurangan tidak terdeteksi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), Najahningrum (2013), dan Suryandari & Wulandari (2016) yang menyatakan bahwa dengan asimetri informasi yang tinggi maka kecurangan yang terjadi juga semakin tinggi.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan asimetri informasi terhadap kecurangan (*fraud*) di Dinas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah. Sementara sistem pengendalian internal, komitmen organisasi

berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah, dan asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) Dinas Provinsi Jawa Tengah.

Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal yaitu implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis peneliti ini memberikan bukti bahwa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*), sedangkan asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*), dan keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi terjadinya dengan meningkatkan pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan asimetri informasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menghambat hasil penelitian diantaranya yaitu

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan data primer yang berupa kuesioner yang tidak dilengkapi dengan wawancara kepada responden. Sehingga memungkinkan jawaban yang diberikan oleh responden tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Pemilihan sampel pada penelitian ini hanya berfokus pada bidang keuangan saja.

Agenda Penelitian Mendatang

Diharapkan penelitian ini dimasa mendatang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan adanya masukan mengenai :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian lain yang mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap kecurangan (*fraud*).
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas responden penelitian. Karena tindak kecurangan tidak hanya dilakukan pada satu bagian saja tetapi dapat pula dilakukan pada bagian lainnya.
3. Penelitian ini masih terdapat kelemahan yakni terdapat beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga data yang diperoleh tidak menggambarkan keadaan yang

sebenarnya, sehingga untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan kuesioner namun juga melakukan wawancara langsung kepada responden secara tegas dan jelas agar mendapatkan data yang lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda dan Ikhsan. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal AAJ* 4 (3), 1-9.
- Asshidiqie, Jimly. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi 1 Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Colquitt, J. L. (2009). *Organizational behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace*. New York: McGraw-Hill.
- Didi dan Kusuma. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud); Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal*

- Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 15 No. 1 2018*, 1-20.
- Faisal, Muhammad. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal AAJ 2(1) (2013)*, 67-73.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ivancevich, et. al. (2007). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kompas. (2018). *Catatan ICW soal Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018*. Diambil kembali dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catan-icw-soal-penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2018>
- Moorhead dan Griffin. (2013). *Organizational Behavior Managing Human Resources and Organizations, 9th edition, diterjemahkan oleh D. Angelica Perilaku Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, 259-267.
- Pristiyanti, I. R. (2012). *Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Robbins, S. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Wulandari, Retno & Dhini Suryandari. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Temanggung.
Accounting Analysis Journal
Vol 5 No 2, 76-85.

Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah

Sumber Lain

.

LAMPIRAN

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Deviation
Kecurangan	105	31	45	38,00	38,75	3,939
Keadilan Distributif	105	6	15	12,00	12,06	1,742
Keadilan Prosedural	105	13	25	20,00	19,92	2,817
Sistem Pengendalian Internal	105	17	25	21,00	21,46	2,434
Penegakan Peraturan	105	12	25	20,00	20,10	2,793
Komitmen Organisasi	105	23	40	32,00	32,08	3,887
Budaya Organisasi	105	13	25	20,00	20,01	2,633
Asimetri Informasi	105	11	30	22,00	21,03	3,948
Valid N (listwise)	105					

Sumber: Hasil olah data SPSS (2020)

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Sig(2tailed)	Keterangan
Kecurangan	0,000	Valid
Keadilan Distributif	0,000	Valid
Keadilan Prosedural	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal	0,000	Valid
Penegakan Peraturan	0,000	Valid
Komitmen Organisasi	0,000	Valid
Budaya Organisasi	0,000	Valid
Asimetri Informasi	0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kecurangan	0,783	Reliabel
Keadilan Distributif	0,931	Reliabel
Keadilan Prosedural	0,815	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,808	Reliabel

Penegakan Peraturan	0,772	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,843	Reliabel
Budaya Organisasi	0,814	Reliabel
Asimetri Informasi	0,842	Reliabel

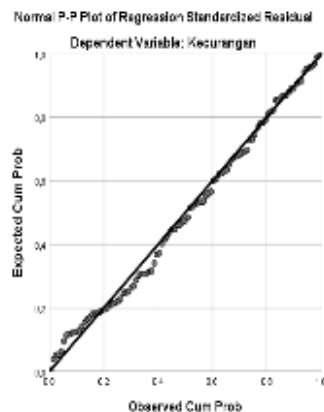
Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov

Nilai Signifikansi	Keterangan
0,200	Data berdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Gambar 2



Tabel 15 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Keadilan Distributif	0,578	1,731
Keadilan Prosedural	0,602	1,660
Sistem Pengendalian Internal	0,436	2,296
Penegakan Peraturan	0,394	2,539
Komitmen Organisasi	0,313	3,196
Budaya Organisasi	0,379	2,638
Asimetri Informasi	0,939	1,069

a. Dependent Variable: Kecurangan

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Tabel 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas

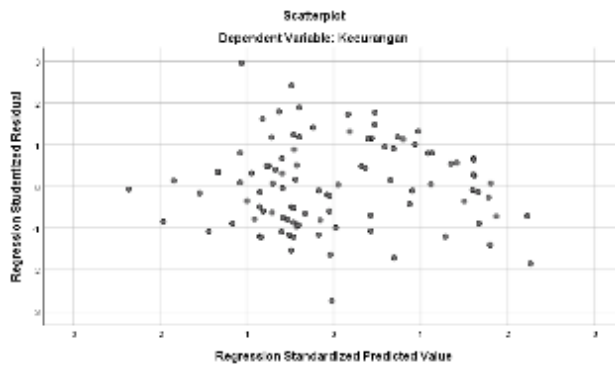
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,9	1,876		1,583	,117

		69				
	Keadilan Distributif	,165	,123	,177	1,348	,181
	Keadilan Prosedural	-,040	,074	-,069	-,535	,594
	Sistem Pengendalian Internal	,058	,101	,087	,573	,568
	Penegakan Peraturan	-,023	,093	-,040	-,251	,803
	Komitmen Organisasi	-,053	,075	-,127	-,711	,479
	Budaya Organisasi	-,019	,100	-,030	-,186	,853
	Asimetri Informasi	-,030	,043	-,072	-,702	,484

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Gambar 3



Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,246	3,256		5,297	,000
Keadilan Distributif	,033	,213	,014	,153	,878
Keadilan Prosedural	,151	,129	,108	1,167	,246
Sistem Pengendalian Internal	,464	,176	,287	2,641	,010
Penegakan Peraturan	-,040	,161	-,028	-,246	,806
Komitmen Organisasi	,372	,130	,367	2,864	,005
Budaya Organisasi	,065	,174	,043	,374	,709
Asimetri Informasi	-,203	,074	-,203	-2,747	,007
N	105				
F	13,981				
Sig	0,000				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Isti Khomah

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Mei 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 21 Tahun

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 13 Semarang

Alamat : Jalan Perhutut Raya Jatisari RT02 RW03
Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota
Semarang

Email : istikhomah177@gmail.com

No. Hp : 081215856942